



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 275 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA LEMBAGA KEBIJAKAN**

**PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan data dan informasi yang andal serta dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Satu Data Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Walidata dan Produsen Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Walidata dan Produsen Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Walidata dan Produsen Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Walidata mempunyai tugas mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia;

membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; serta melaksanakan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.

KETIGA : Produsen Data mempunyai tugas memberikan masukan kepada Pembina Data dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data; menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata; serta membantu Walidata dalam melaksanakan penilaian mandiri evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 159 Tahun 2021 tentang Penetapan Walidata dan Produsen Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2023  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG PENETAPAN WALIDATA  
DAN PRODUSEN DATA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 275 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 JULI 2023

<b>UNIT ORGANISASI ESELON II</b>	<b>PERAN</b>
Pusat Data dan Informasi	Walidata
Biro Perencanaan dan Keuangan	Produsen Data
Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia	Produsen Data
Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Produsen Data
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Produsen Data
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Produsen Data
Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Produsen Data
Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan	Produsen Data
Direktorat Sistem Pengadaan Digital	Produsen Data
Direktorat Pasar Digital Pengadaan	Produsen Data
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	Produsen Data
Direktorat Sertifikasi Profesi	Produsen Data
Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat	Produsen Data
Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah	Produsen Data
Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	Produsen Data
Inspektorat	Produsen Data
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	Produsen Data

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI